

NUSANTARA

GERAKAN DESA MEMBANGUN

Bangun Desa ala Jurnalis Kampung

Di satu sudut balai desa yang kusam, Margino (38) tampak serius mewawancarai seorang petani tentang budidaya sayuran organik. Bak jurnalis profesional, dituliskannya semua jawaban di atas kertas buram. Hanya beberapa jam berselang, artikel itu pun terpampang di portal desa lengkap dengan fotonya.

Wawancaranya santai, kadang di balai desa, kadang di sawah, atau di warung kopi. Isinya tentang topik yang sedang jadi perbincangan hangat di desa, kata petugas Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu, Jumat (14/12). Desa ini cukup terpencil di lereng Gunung Slamet. Margino, yang hanya lulusan sekolah menengah pertama, adalah satu dari 12 jurnalis warga yang rajin mengisi rubrik berita di portal desa mereka: www.melung.or.id. Portal yang lahir dari semangat swadaya orang kampung membangun desanya: Gerakan Desa Membangun (GDM).

Awalnya, bagi Margino menulis merupakan hal yang sulit. Namun, semangatnya tak luntur. Atas izin kepala desa, dia ikuti berbagai pelatihan jurnalisisme warga hingga keluar kota. Margino yang juga aktif di Twitter dan Facebook memanfaatkan media sosial untuk belajar secara otodidak.

Topik tulisan jurnalis kampung ini beragam. Mulai hal remeh seperti lonjakan harga kambing menjelang Idul Adha, bencana alam, hingga yang serius seperti kegelisahan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Baturrenden yang dekat dengan desa.

Pagi hari, Margino dengan beragam coklatnya mulai mencari data ke lapangan. Ia berbincang dengan petani di sawah tentang berbagai soal. Siangnya, selaku perangkat desa, dia kembali ke balai desa melakukan pekerjaan administrasi rutin. Di waktu senggang, dia sempatkan riset kecil-kecilan lewat internet terkait temuan "investigasinya". Margino juga tidak segan lembur di balai desa merampungkan tulisannya.

Manfaat sosial media

Jejaring sosial media juga digunakan Margino dan sejumlah warga desa untuk mempromosikan kampung mereka. Sayuran organik, kopi luwak, hingga agenda desa tidak luput dari ceciric mereka di dunia maya.

"Waktu ada bencana longsor, kami meminta bantuan ke pemkab, tapi tak ada tanggapan. Setelah informasinya diunggah di Twitter dan banyak di-retweet, selang sehari, dikirim ekskavator untuk membersihkan long-

sor," ujar Margino tersenyum.

Warga pun memanfaatkan internet untuk mengembangkan perekonomian. Narwin (31), misalnya, belajar budidaya pertanian organik dari data yang didapat melalui mesin pencari Google. Hasil pertanian organik itu pun dipasarkan lewat jejaring media internet.

Kini, setahun setelah portal desa dimulai, dampaknya mulai dirasakan warga. Kepala Desa Melung Agung Budi Satrio yang merupakan salah seorang inisiator GDM mengaku, warga desanya tak lagi minder. Berbagai komunitas, mulai dari pemerintah desa lain hingga wisatawan, datang berkunjung.

Di Banyumas, sekitar 25 dari 331 desa/kelurahan mengikuti jejak Desa Melung bergabung dalam GDM. Lebih dari sekadar pengelolaan informasi desa, gerakan ini juga mendorong warga peduli terhadap desanya sendiri. Qodirin (40), petani Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, mengatakan, tak hanya perangkat desa, warga pun memiliki akses untuk menulis ke portal desa: www.karangnangka.or.id.

Bekas desa tertinggal

Bukan kebetulan pula jika anggota GDM muncul dari desa-desa yang lama menyandang predikat desa tertinggal. Seperti halnya Desa Mandalamekar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Yana Noviandi (44), Kepala Desa Mandalamekar, mengakui, desanya berjarak sekitar 40 km dari Kota Tasikmalaya. Sebagian jalan masih berupa jalan setapak dari tanah dan berbukit.

"Puluhan tahun kami tak tersentuh pembangunan. Setelah aktif di bidang lingkungan dan menampilkannya melalui media sendiri, perhatian baru bermunculan," tuturnya saat menghadiri Syukuran Satu Tahun Gerakan Desa Membangun di Desa Melung, pekan lalu.

Budaya jurnalisisme warga oleh warga untuk warga ini, menurut Yossy Suparyo, pegiat komunitas peranti lunak tak berbayar dari Infest Yogyakarta dan BlankOn Indonesia, merupakan pintu masuk GDM. Tata kelola informasi secara mandiri mendorong warga hirau terhadap perkembangan sosial.

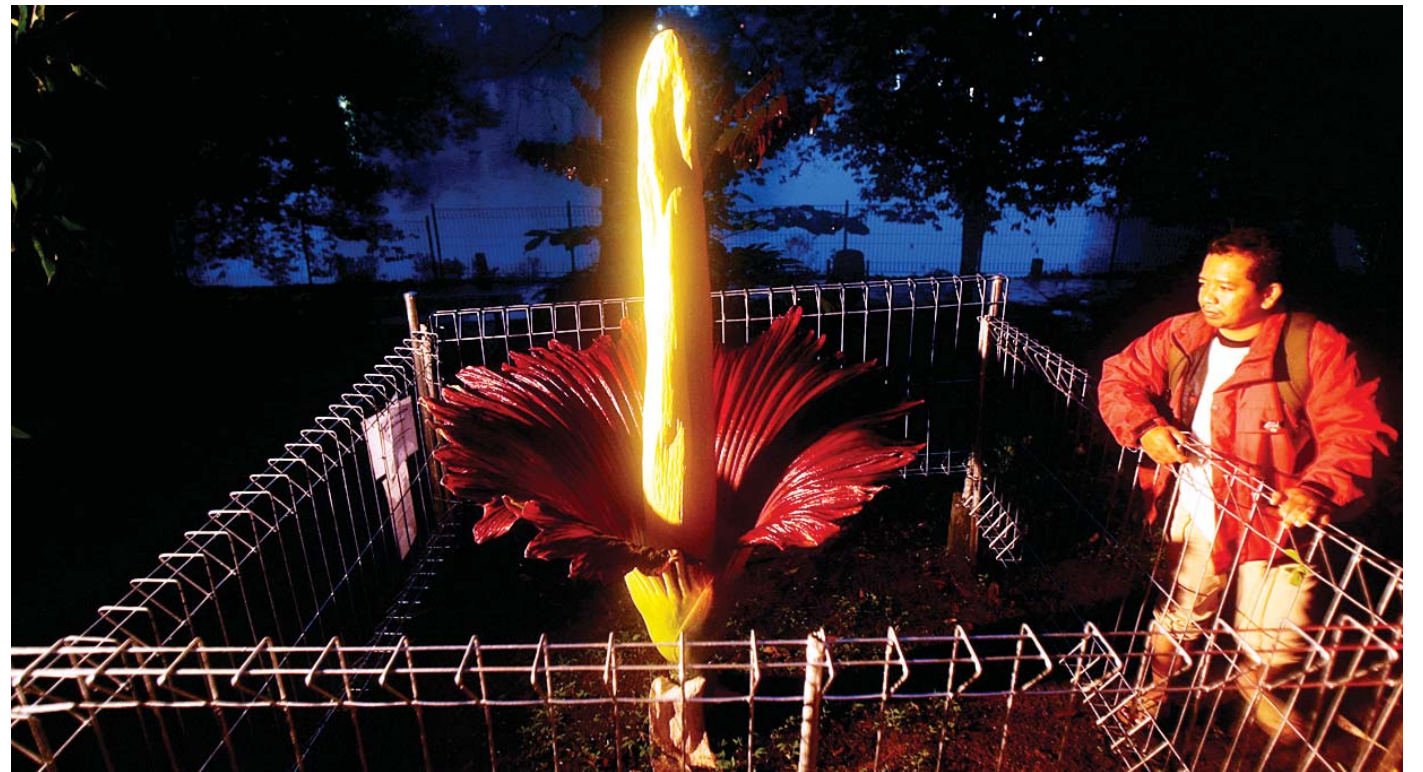
"Semangat awal GDM untuk menjawab kegelisahan warga desa yang selama ini terping-

girkan dan hanya menjadi obyek. Sudah saatnya inisiatif pembangunan diambil desa. Dimulai dari tata kelola sistem informasi," ungkap Yossy, salah seorang pionir GDM.

Komunitas *open source* yang terdiri dari Infest, BlankOn, dan Yayasan Air Putih sangat berjasa membidani gerakan ini. Selain membuat portal bagi desa, mereka menyediakan program Mitra Desa 10 yang memuat seluruh data masyarakat berbasis nomor induk kependudukan.

Paradigma lama para pejabat pemerintahan pusat tentang pembangunan desa agaknya sudah jadi cerita lama. Saat orang kampung jengah dengan kultur transaksional desa-pusat, mereka mengambil inisiatif membangun. (GREGORIUS M FINESSO)

Puncak Mekar Bunga Bangkai Raksasa



Bunga bangkai jenis *Amorphophallus titanum* Becc mencapai waktu puncak mekar di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda, Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/12) petang. Bunga raksasa yang hidup di wilayah dengan kelembaban tinggi ini mekar dengan ukuran tinggi 193 sentimeter dan lebar mahkota 86 sentimeter.

KOMPAS/ROYNY ARIYANTO NUGROHO

Magical Season

1 NIKMATI
1 HARI
BELANJA HEMAT %

hingga

50

Atau Nikmati!

BONUS INSTAN Rp 50.000**

KINI BERLAKU KELIPATAN

**Untuk minimum pembelian Rp 150.000

MATAHARI
DEPARTMENT STORE

Complete Your Shopping Experience

*Produk tertentu Berlaku 16 Desember 2012

KORUPSI

Ditahan, Tersangka Korupsi Bansos di NTB

MATARAM, KOMPAS — Kejaksaaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menahan AS, tersangka kasus korupsi Bantuan Sosial Lombok Barat tahun 2009. Kasus ini ditangani selama dua tahun karena penuntut umum menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan seputar kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan penyaluran bansos itu.

Kepala Seksi Humas Kejati NTB Made Sutapa, Sabtu (15/12), di Mataram, membenarkan adanya penahanan AS di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram sejak Rabu (12/12). Sebelumnya, AS yang menjabat Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemkab Lombok Barat diperiksa atas keterlibatannya dalam bansos saat menjabat Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Lombok Barat, tahun 2009.

Selain AS, pejabat lain Pemkab Lombok Barat yang menjadi tersangka adalah R, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PPKAD Lombok Barat, dan JS, Bendahara Bansos Lombok Barat. R yang kini menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lombok Barat akan diperiksa Senin (17/12). JS kini ditahan di Polres Lombok Barat, dalam kasus dugaan penganiayaan, bukan kasus bansos.

Kasus bansos sudah ditangani dua tahun lalu, disusul ditetapkannya para tersangka. Namun,

tindak lanjut proses hukum kasus bansos ini atau pelimpahan perkaranya ke pengadilan tidak kunjung direalisasi pejabat Kajati NTB, padahal sudah berganti tiga kali. Alasan mereka masih menunggu hasil audit BPK.

Berdasarkan hasil audit BPK, kerugian negara dalam kasus ini berkisar Rp 2 miliar-Rp 3 miliar, dari total pagu bansos Rp 60 miliar. Penyalahgunaan kerugian negara diduga dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memalsukan nama penerima bansos, antara lain yayasan sosial dan pondok pesantren. Berikutnya pemalsuan stempel penerima bansos yang berjumlah 500 stempel.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda NTB Ajun Komisaris Besar Sukarman Husain, mengatakan, Polda NTB, selama 2012, memproses 36 kasus korupsi, yang diduga melibatkan 30 pejabat, seperti kepala dinas, kepala badan, anggota legislatif dan pegawai pemerintah dan swasta. Dari total kasus itu, 17 perkara dalam tahap pelimpahan ke kejaksaan. Total kerugian negara dari 36 kasus korupsi sekitar Rp 7 miliar lebih.

Para pejabat itu diduga sebagai aktor, turut serta dan menikmati uang negara tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dana yang disalahgunakan tersebut berasal dari berbagai proyek pembangunan, pengadaan barang, dan jasa. (RUL)

100%
INDONESIA